



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Sekolah Pengawasan dan Pemantauan Pengadaan Publik (SP3)

Juli – September 2020

Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap praktik korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (OECD, 2007: 9). Hasil penelitian tersebut sedikit banyak juga terkonfirmasi di Indonesia. Meskipun telah diterapkan penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa, perilaku koruptif nyatanya masih kerap terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyebutkan, 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penindakan kasus korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum sepanjang 2019 menemukan bahwa 64,2% dari 271 kasus korupsi yang ditangani merupakan korupsi PBJ dengan kerugian negara sebesar Rp 957,3 miliar dan suap Rp 91,5 miliar (ICW, 2020).

Risiko Korupsi pengadaan tidak pernah memandang sektor. Pengadaan untuk pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, juga tak lepas dari praktik korupsi. Masalah ini berkorelasi langsung pada buruknya kualitas fasilitas publik. Dalam beberapa kasus, korupsi pengadaan sektor pelayanan publik ini bahkan membahayakan masyarakat. Misalnya, kualitas gedung sekolah yang buruk dapat berpotensi ambruknya gedung sekolah dan terancamnya nyawa siswa yang sedang belajar. Pada pengadaan penanganan pandemi misalnya, banyak alat tes covid-19 yang dikembalikan oleh Rumah Sakit akibat alat tes tersebut tidak kompatibel. Korupsi pengadaan umumnya terjadi karena dibajaknya pengadaan, baik oleh penyelenggara negara yang terkait didalamnya maupun rekanan penyedia barang dan jasa, untuk mengeruk keuntungan yang tidak semestinya. Modus yang kerap muncul yaitu suap, mark-up anggaran, pengadaan fiktif, dan gratifikasi.

Sehubungan dengan masih maraknya masalah dalam pengadaan barang/jasa, Transparency International Indonesia bersama mitra di tiga daerah membentuk gerakan Komite Anak Muda Pemantau Pengadaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko korupsi pengadaan publik di daerah. Jaringan kelompok advokasi yang dipimpin anak muda ini diharapkan mampu secara mandiri mendorong partisipasi publik dalam melakukan advokasi dari aspek perencanaan, penganggaran hingga melakukan audit sosial dari proses pengadaan publik. Guna memperkuat gerakan kolektif anak muda, dibutuhkan serial peningkatan kapasitas bagi Komite Anak Muda Pemantau Pengadaan.

Tujuan Kegiatan

1. Memfasilitasi ruang belajar melawan Komite Anak Muda Pemantau PBJ;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman empirik terkait korupsi di sekitar anak muda;
3. Mengamplifikasi solidaritas kolektif gerakan antikorupsi Anak Muda;



Pelaksanaan Kegiatan

Serial Pelatihan : Minggu ketiga Juli – Minggu Pertama September 2021
Waktu : 09.00-15.30 WIB
Tempat : Secara *online* menggunakan platform Zoom TI-Indonesia

Peserta Kegiatan

1. Komite Anak Muda Pemantau PBJ di Jember, Aceh dan Kabupaten Kupang
2. Migrant Care Jember
3. Gerak Aceh
4. Bengkel APPEK

Alur Kegiatan

Waktu	Kegiatan	PIC
09.00-09.30	Registrasi	Panitia
09.30-09.45	Pembukaan Kegiatan	TII
09.45–11.00	Penyampaian Materi	Fasilitator
11.00-12.00	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator Fernan
12.00-13.00	Istirahat	
13.00-14.15	Penyampaian Materi Ke 2	Fasilitator
14.15-15.15	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
15.15-15.30	Penutup	Ti Indonesia



Kurikulum Pembelajaran

No.	Klaster	Materi Ajar	Pengajar	Organisasi	Waktu
1.	Memahami Korupsi	Dasar-dasar korupsi	Danang Widoyoko	TI Indonesia	27 Juli
2.		Sejarah korupsi di Indonesia	Danang Widoyoko	TI Indonesia	27 Juli
3.		Lembaga antikorupsi di Indonesia	Vishnu Juwono	Akademisi	29 Juli
4.		Sosiologi korupsi	Meuthia Ganie-Rochman	Akademisi	29 Juli
5.		Psikologi kriminal pelaku korupsi	Ratih Ibrahim	Personal Growth	3 Agustus
6.		Korupsi dan kesetaraan gender	Lely Zailani	Perkumpulan Hapsari	3 Agustus
7.		Gerakan antikorupsi global dan Indonesia	Wawan Suyatmiko	TI Indonesia	5 Agustus
8.	Korupsi di Sekitar Kita	Korupsi dan politik	Robertus Robet	Akademisi	5 Agustus
9.		Korupsi dan korporasi	Ferdian Yazid	TI Indonesia	10 Agustus
10.		Korupsi di sektor kesehatan	Irma Hidayana	Lapor Covid 19	10 Agustus
11.		Korupsi di sektor pendidikan	Siti Juliantari	ICW	12 Agustus
12.		Korupsi di sektor penegakan hukum	Reza Syawawi	TI Indonesia	12 Agustus
13.		Mengenal definisi, fungsi, siklus, struktur dan politik anggaran publik (APBN, APBD, dan APBDes)	Misbah Hasan	FITRA	19 Agustus
14.	Korupsi di sektor PBJ	Memahami dan menganalisa kebijakan publik	Fransisca Fitri	YAPPIKA	19 Agustus
15.		Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, inklusif dan responsif gender	Tenty Kurniawati	IDEA Jogja	24 Agustus
16.		Mengenal PBJ	Mira Erviana	LKPP	24 Agustus
17.		Modus korupsi PBJ	Rieswin Rachel	KPK	26 Agustus
18.		Pemantauan publik terhadap PBJ (terutama selama pandemi Covid-19)	Agus Sarwono	TI Indonesia	26 Agustus
19.		Membangun gerakan kolektif berbasis anak muda (<i>youth activism</i>) * <i>refleksi gerakan daerah</i>	Tim Daerah	3 Mitra Daerah	31 Agustus



20.	Pengembangan Diri	Keterbukaan informasi publik	Bejo Untung	PATTIRO Jakarta	2 September
21.		Audit sosial dan <i>complaint handling mechanism</i>	Alvin Nicola	TI Indonesia	2 September
22.		Jurnalisme investigasi	Wahyu Dhyatmika	TEMPO	7 September
23.		Merancang kampanye antikorupsi yang sukses	Nur Fajrin	TI Indonesia	7 September
24.		Pemantauan dana desa	Agus Sarwono	TI Indonesia	9 September
25.		Litigasi strategis	Gita Damayanti	PSHK	9 September
26.		Advokasi dan lobi kebijakan publik	Bivitri Susanti	Akademisi	14 September
27.		Berpikir kritis	Emilia Thiurma	@_jadigini	14 September
28.		Adaptive leadership	Andhyta Firseli Utami	World Bank	16 September
29.		Collective Engagement	Dwiana Fiqhi Cahyani	Sekretariat OGI	16 September
30.		Keamanan digital	Damar Juniarto	SAFEnet	21 September